

## Harus Ada Evaluasi untuk Atasi Ketimpangan



*REMBUK ETAM: Seno Aji bersama para narasumber dan audiensi serta tamu undangan yang hadir di Studio Balikpapan Tv.*

*(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Minggu, 08/06/2025*

**DALAM** gelaran Rembuk Etam “Gratispol: Menakar Kontribusinya pada Pencapaian Asta Cita”, Kaltim Post dan Balikpapan Televisi bekerja sama dengan IKA UB Kaltim juga mengundang sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Termasuk perwakilan dari mahasiswa dan pengamat pendidikan.

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Abdunnur yang membuka pandangan awal, menyebut perlu sinergi bersama semua pihak untuk menyukseskan program Gratispol.

Namun di sisi lain juga harus ada indikator capaian. Karena sesuai tujuannya, program itu untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Sementara banyak indikator yang ada di dalamnya.

"Biaya pendidikan hanya salah satu komponen peningkatan kualitas pendidikan. Belum bicara soal mutu pendidikan di dalamnya. Karena itu, perlu sinergi. Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus terlibat. Termasuk evaluasi. Salah satunya melalui IPK (indeks prestasi kumulatif), misal IPK 2,5 atau lama kelulusan," ucapnya.

Selain itu, evaluasi terhadap program itu juga harus diukur melalui angka serapan kerja. Mengingat di kampus sendiri, akreditasi juga ditentukan oleh persentase jumlah lulusan sarjana yang diterima pasar kerja dalam kurun enam bulan pasca kelulusan. Tentu hal itu harus dibicarakan lebih dalam secara teknis kepada pemerintah. Selain itu harus ada sistem pendukung yang meringankan beban hidup mahasiswa.

"Karena itu harus ada indikator capaian. Harus ada *impact*-nya. Kami (Unmul) juga berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pembelajaran dan mutu pendidikan. Jadi kita sama-sama evaluasi," ujarnya.

Dengan Gratispol pendidikan gratis ini pula, Abdunnur menyebut, ke depan diharapkan bisa menuntaskan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi Kaltim, yang hanya 20 persen di bawah rerata nasional sebanyak 30 persen. Sementara Malaysia sudah di angka 40 persen dan Singapura 50 persen.

"Tentu itu menjadi harapan. Jangan sia-sia. Harus tepat tujuan, sasaran, dan capaian. Dan saran saya untuk awal anggaran ini bisa menyasar pada mahasiswa tingkat akhir. Karena datanya sudah jelas. Dan saat ini di Unmul sudah ada data, tahun ini ada 5 ribu mahasiswa sudah diberi bantuan Gratispol ini," ucap Abdunnur.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Widodo mengungkapkan, Gratispol yang juga akan menyasar pada mahasiswa Kaltim yang berkuliah di perguruan tinggi luar Kaltim sangat tepat diberikan. Mengingat seperti di UB saja, dalam tiga tahun terakhir tercatat ada 381 mahasiswa yang berkuliah di semua fakultas yang dimiliki UB. "Kami berterima kasih kepada Pemprov Kaltim dan masyarakat Kaltim yang memercayai UB sebagai tempat belajar. Dengan program ini (Gratispol), ini sangat bagus. Karena esensi dari pembangunan adalah SDM (sumber daya manusia)-nya. Karena sebuah daerah yang kaya SDA kalau SDM-nya masih rendah, maka pasti akan diambil oleh daerah lain," ucapnya.

#### **MENYELESAIKAN KETIMPANGAN**

Program Gratispol pendidikan gratis disebut sebagai lompatan luar biasa. Mengingat di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, konsep pendidikan gratis sudah ada sejak lama. Mulai TK hingga perguruan tinggi. Namun di sisi lain, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga ditentukan dengan peningkatan kualitas lembaga pendidikannya.

"Kita belajar dari negara-negara yang lepas dari *middle income* menjadi negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, itu ditentukan kualitas perguruan tinggi. Karena dari sana muncul inovasi-inovasi. Di Asta Cita itu salah satunya akan bermuara di hilirisasi. Dan Gratispol ini kami sangat mendorong *sustainable* dan lulusannya itu 'naik', harus ada stimulus di sana," ungkap Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Agus Rubiyanto.

Apalagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), Agus menyebut, banyak kampus termasuk ITK yang menerima mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terpanggil untuk belajar di Kaltim karena akan menjadi pusat pembangunan Nusantara. Sehingga ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus yang ada di Kaltim.

"Karena itu saya sepakat, Gratispol harus ada evaluasi. Ada indikator capaian. Kami pun ada ide-ide termasuk bagaimana kampus dan pemerintah ini bisa memberikan *reward* kepada mahasiswa berprestasi atau menemukan sesuatu yang berdampak ke masyarakat. Misal menemukan teknologi tepat guna," sebutnya.

Di sisi lain, Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal menyebut, saat ini pandangan pendidikan gratis dari masyarakat masih terbatas pada perguruan tinggi negeri (PTN). Namun berbeda di perguruan tinggi swasta (PTS). Karena masih ada biaya-biaya

lain yang dikenakan PTS kepada mahasiswanya selain uang kuliah tunggal (UKT). Karena itu, harus menjadi perhatian bersama karena menjadi harapan masyarakat.

"Kami para rektor tentu mengapresiasi Gratispol pendidikan gratis ini. Tetapi harapannya ke depan juga dikedepankan berbasis keperluan. Seperti Uniba yang saat ini membangun Fakultas Kedokteran, hampir 95 persen itu SDM yang direkrut dari luar Kalimantan. Artinya SDM dokter Kaltim sangat minim. Utamanya spesialis," ujar Isradi.

Isradi juga konsen terhadap adanya informasi kebijakan, di mana mahasiswa yang sudah mendapatkan program Gratispol, maka dilarang menerima beasiswa UKT dari pihak lain. Baginya itu merugikan. Sehingga ke depan, jika memang ada stimulus dari pemerintah di luar Gratispol terkait UKT, maka tidak masalah jika diberikan kepada mahasiswa tersebut.

"Saya yakin meski ada Gratispol, namun tidak semua anak-anak kita mampu kuliah. Karena kasusnya, masih banyak dari mereka yang jadi tumpuan keluarga. Sehingga perlu skema ke depan. Sehingga mereka yang berkuliah nanti tidak perlu memikirkan beban ekonomi keluarga," ujarnya.

Menanggapi kondisi saat ini, pengamat pendidikan Kaltim Prof Susilo mengupas dua masalah besar pendidikan. Yakni pemerataan dan daya saing. Yang ibarat timbangan, keduanya akan naik dan berkurang jika salah satunya ditekan. Namun hadirnya Gratispol itu disebutnya mampu menekan atau menaikkan keduanya.

"Dari sisi pemerataan, Gratispol ini meningkatkan pemerataan pendidikan. Mengingat dari sisi pemerataan, Kaltim sebenarnya hampir tuntas. Tersisa yang jenjang SMA/SMK tadi. Nah, untuk daya saing ini khususnya di perguruan tinggi, temuan saya ketika menjadi evaluator dari program beasiswa pemerintah sebelumnya, itu dari sisi sebaran program studi atau fakultas di Kaltim itu tidak merata," ucapnya.

Dengan Gratispol masuk, Susilo menyebut tanpa memiliki syarat-syarat yang dikenakan seperti beasiswa sebelumnya, yang jadi penghalang masuknya calon-calon sarjana dengan keahlian "langka", maka disebutnya menjadi *good starting point*. Termasuk meningkatkan kualitas dan daya saing PTS yang selama ini kesulitan mendapatkan mahasiswa karena masalah biaya.

"Itu akan meningkatkan kualitas di PTS juga. Karena sebelumnya banyak prodi yang sulit ada karena mahasiswanya tidak ada dikarenakan biayanya yang tinggi. Gratispol membantu itu. Sementara untuk daya saingnya, bisa melalui kerja sama," jelasnya.

Terkait keperluan SDM, menurutnya untuk melahirkan sarjana dengan keahlian tertentu dengan menguliahkan anak-anak Kaltim ke luar adalah solusi jangka pendek. Adapun jangka panjang adalah dengan meningkatkan kualitas kampus lokal. "Evaluasi pasti harus ada. Dan saya yakin Tim Gratispol sudah memiliki rancangan itu," ucap Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul itu.

## **MEMPERBAIKI PENDIDIKAN**

Dari kalangan mahasiswa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uniba Hijir Ismail menyebut, saat ini masih banyak pertanyaan di masyarakat terhadap Program Gratispol. Apakah benar-benar gratis atau tidak. Di sisi lain, terkait sumber anggaran

Gratispol. Apakah bakal mengorbankan alokasi anggaran lain, misal infrastruktur. Termasuk kemampuan program itu untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

"Karena tidak semua orang yang masuk kampus mampu mendapatkan pendidikan berkualitas, akses dan infrastrukturnya bagaimana juga bisa ditingkatkan," ucap Hijir.

Ditambahkan Divisi Ekonomi Kreatif BEM Uniba, Natasya menyinggung terkait sasaran Gratispol. Apakah hanya untuk mahasiswa baru atau juga kepada mahasiswa yang saat ini tengah berkuliah. Termasuk biaya lain, seperti buku, wisuda hingga soal tanggungan biaya hidup mahasiswa.

Dari perwakilan Keluarga Mahasiswa ITK, Nadriano Ananta Dharma Putra mendorong pemerintah untuk bisa meningkatkan kesadaran anak-anak Kaltim di jenjang SMA/SMK untuk mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Termasuk fakta yang ditemukannya terkait kendala ekonomi keluarga yang menjadi halangan teman-temannya untuk berkuliah.

"Padahal mereka memiliki pemikiran yang lebih dan kritis dibandingkan saya. Bagaimana mereka itu bisa diakomodasi melalui program Gratispol. Yang kedua, harus dijelaskan apakah dalam program ini ada kuotanya di setiap institut atau universitas?" ungkapanya.

Pertanyaan dari mahasiswa tersebut lantas dijawab Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Dia menegaskan, dana Gratispol pendidikan gratis tidak menyentuh pada anggaran untuk infrastruktur. Melainkan murni dari anggaran pendidikan 20 persen.

Angkanya sekitar Rp5 triliun dari sekitar Rp21 triliun APBD Kaltim 2025. Lebih rinci, dari tahap awal membiayai uang tunggal kuliah (UKT) mahasiswa baru, sebagai sasaran pertama, dikeluarkan Rp190 miliar tahun ini. Selanjutnya sasaran bagi semua mahasiswa semester 1 hingga 8 akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026.

"Evaluasi tentu dilakukan setiap tahunnya. Utamanya kepada perguruan tinggi yang sudah bekerja sama. Kami ingin universitas di Kaltim ini ke depan akan menjadi destinasi edukasi nasional," sebutnya.

Lantas bagaimana dengan keperluan hidup mahasiswa? Seno menyebut, Pemprov Kaltim tengah berkoordinasi dengan pemerintah di kabupaten/kota. Bisa ikut membantu mahasiswa daerahnya yang berkuliah di luar daerah. Termasuk akan mengevaluasi kebutuhan hidup bagi mahasiswa miskin dari Pemprov Kaltim langsung (**rdh/rd**)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Harus Ada Evaluasi untuk Atasi Ketimpangan, 08/06/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi (Pergub Kaltim 24/2025) dijelaskan antara lain sebagai berikut.
  - a. angka 8  
Bantuan biaya pendidikan tinggi adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub-spesialis

- dan doktor, dalam rangka meringankan beban dalam memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa untuk membantu menutupi sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan pendidikan yang ditempuh.
- b. angka 12  
Program Pendidikan Gratispol adalah beasiswa dan/atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik asal Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
2. Dalam Pasal 4 Pergub Kaltim 24/2025 diatur sebagai berikut.
- (1) Sasaran penerima Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    - a. Mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur serta menempuh pendidikan tinggi pada semua jenjang di dalam dan luar daerah dalam negeri/luar negeri;
    - b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim atau melalui program khusus atau jalur kerja sama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri; dan
    - c. Mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
  - (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diprioritaskan bagi:
    - a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, yaitu mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang;
    - b. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan khusus, yaitu mahasiswa dengan keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas dan mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti dari daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T); dan
    - c. Mahasiswa berprestasi yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4.00 (empat koma nol nol) atau non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik.